

ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI INDUSTRI, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2020

Agnesa Marytha Chrisetyoningrum✉

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economic and Business,
Universitas Diponegoro

✉agnesamarythac@students.undip.ac.id

Abstract

Tujuan: *This study aims to determine the level of inequality between regencies/cities in Central Java Province, and the influence of industrial agglomeration, population on income disparities in Central Java Province.*

Metode: *The data used in this study is secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) 2016-2020. The analytical method used is descriptive and regression. Regression analysis using panel data. Economic disparities are calculated by the Williamson Index. The effect of industrial agglomeration and population on income disparity was analyzed using linear regression fixed effect model.*

Hasil: *The Williamson index value for all districts/cities shows economic inequality that occurs in low criteria, except for Brebes district with moderate criteria. Industrial agglomeration variables and population have a simultaneous effect on income disparities in Central Java Province.*

Kata Kunci: *Economic Disparity, Industrial Agglomeration, Population*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang di hadapi negara Indonesia adalah dengan adanya disparitas/ ketimpangan pada distribusi pendapatan terhadap golongan masyarakat yang berpendapatan rendah dan golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi, sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi kemudian berdampak pada kemiskinan yang semakin meningkat (Tambunan, 2001). Terjadinya ketimpangan mengakibatkan terdapat daerah yang mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara daerah yang lainnya tidak dapat mencapai pertumbuhan yang sama dikarenakan tidak adanya sumber sumber yang dimiliki. Hal tersebut karena adanya kecenderungan investor lebih memilih daerah perkotaan atau daerah sudah tersedia fasilitas yang lengkap seperti, prasana perhubungan, jaringan telekomunikasi, perbankan, serta tenaga terampil (Barika,2012)

Pulau Jawa merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Meskipun demikian ketidakmerataan juga terjadi di Pulau Jawa. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun demikian, Jawa Tengah bukanlah termasuk tiga besar Provinsi yang menduduki rata – rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa.

Menurut Arsyad (1999), peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan ketimpangan regional. Meningkatnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah akan menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita. Meningkatnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat meningkatkan perekonomian apabila diikuti dengan meningkatnya produktivitas. Namun apabila meningkatnya jumlah penduduk tidak didukung dengan peningkatan produktivitas akan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut. Sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan (Rosa & Sovita, 2016). Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 34.019.095 jiwa menjadi 36.490.713 jiwa. Kemudian tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 34.490.835 jiwa. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari 34.490.835 jiwa hingga menjadi 34.940321 jiwa.

Menurut Sjafrizal (2008) cukup tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi yang terjadi akan mendorong terjadinya ketimpangan atau disparitas pembangunan antar wilayah. Sebaliknya, apabila rendahnya konsentrasi ekonomi pada suatu daerah maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Akai-Sakata (2005) dan Lessman (2006) mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan jumlah orang yang bekerja.

Pengembangan sektor industri yang merata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan sektor industri merupakan titik pengembangan perekonomian daerah dalam rangka untuk meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemusatan kegiatan ekonomi akan memberikan dampak kepada wilayah yang memiliki aktivitas perekonomian berlangsung. Pengaruh atau dampak tersebut dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung serta dapat berupa dampak positif yang membawa keuntungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah lebih cepat, penyediaan lapangan kerja akan ikut serta meningkat, sehingga tenaga kerja yang diminta mengalahi meningkakan sesuai dengan permintaan dari harus sikap lilim dan negatif yang menimbulkan biaya dan atau kerugian sosial juga berupa ketimpangan antar wilayah. Aglomerasi indutri dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional yang terjadi (Damayanti, 2017).

Berdasarkan pentingnya disparitas/ ketimpangan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 2 variabel terhadap disparitas pendapatan. dengan judul “*Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah*”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator berhasilnya suatu proses pembangunan ekonomi pada suatu negara atau wilayah adalah dari pertumbuhan ekonominya. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi (Sukirno 2006)

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2012) adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Boediono juga menekankan aspek yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Proses disini melihat bagaimana perkembangan ekonomi dalam suatu negara dapat berkembang dalam waktu ke waktu. Output per kapita dapat dilihat dari dua sisi yaitu output totalnya (PDB) dan jumlah penduduk. Output per kapita dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah output total dengan jumlah penduduk.

Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal. Menurut Sjafrizal (2008), yang dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah antara lain : (a) Perbedaan kandungan sumber daya alam (b) Perbedaan Komposisi Geografis (c) Kurang lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa (d) Konseentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah (e) Alokasi dana Pembangunan Antar Wilayah

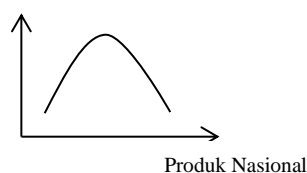
Menurut Mudrajat Kuncoro (2003), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Keadaan ini oleh Kuznets digambarkan dengan kurva U terbalik seperti gambar 1.1

Gambar 1.1

Kurva ketimpangan Pembangunan

Koefisien



Sumber: Todaro dan Smith 2006

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004)

Ukuran Ketimpangan Wilayah

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. Ada kalanya masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada daerah bersangkutan.

Ketimpangan wilayah merupakan ketidakmerataan pendapatan yang diterima antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson dengan PDRB konstan.

Penelitian Terdahulu

Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, (2004) melakukan penelitian tentang Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas periode tahun 1993-2003, dengan menggunakan data PDRB, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil, hasil dari analisis penelitian tersebut adalah Berdasarkan Tipologi Klassen daerah/kecamatan di Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan perkapita menjadi 4 kelompok, yaitu kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tetapi tertekan, kecamatan yang berkembang cepat dan kecamatan yang tertinggal.

Jaime Bonet (2005) melakukan penelitian dengan judul Fiscal Decentralization and regional income disparities: evidence from the Colombian experience. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas hubungan antara desentralisasi fiskal dan kesenjangan regional di Kolombia selama tahun 1990an dengan menggunakan data panel yang memasukkan variabel aglomerasi kedalam modelnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama periode analisis, proses desentralisasi fiskal meningkatkan kesenjangan pendapatan regional. Kemudian Bonet menekankan pada dua variabel, yaitu tingkat keterbukaan perekonomian dan trend aglomerasi ekonomi yang mempunyai pengaruh negative terhadap keseimbangan pendapatan regional.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan empat variabel bebas (variabel independen). Adapun definisi dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)
Disparitas pendapatan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pendapatan antar wilayah antar Kabupaten/kota diukur dengan Indeks Williamson.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Indeks ketimpangan Williamson

Y_i = PDRB per kapita di Kabupaten/Kota j

Y = PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/ Kota J

n = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

(Kuncoro 2004:114)

2. Aglomerasi Industri (Agl)
Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan penghitungan yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari share PDRB wilayah terhadap total PDRB.

Adapun rumus tersebut adalah:

$$Ag\ in = \frac{PDRB\ sektor\ industri}{PDRB\ total\ sektor\ industri}$$

Dimana:

Ag in = Aglomerasi Produksi sektor industri kabupaten/kota di Jawa Tengah

PDRBi = Nilai kontribusi sektor industri Atas dasar konstan kabupaten/Kota di Jawa Tengah

PDRBtot = Nilai kontribusi sektor industri Atas dasar harga Konstan Provinsi Jawa Tengah

3. Jumlah Penduduk (Jml Pnd)
Penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Provinsi Jawa Tengah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, Konsep Kependudukan, 2018). Data yang digunakan adalah jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2016 – 2020 (dalam satuan jiwa).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan *Eviews 9.0*. Data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Regresi data panel menyediakan empat kemungkinan model yang dapat digunakan yaitu *common effect*, *fixed effect* efek tetap), *fixed effect within-grup*, dan *random effect* (Gujarati dan Potter, 2013). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (jumlah penduduk, Aglomerasi Industri) terhadap variabel terikat (Disparitas Pendapatan). Estimasi model yang akan digunakan sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Agl}_{it} + \beta_2 \text{Jml Pnd}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Disparitas Pendapatan
Agl = Aglomerasi Industri
Jml Pnd = Jumlah Penduduk
 β_0 = Konstanta,
 β_{1-4} = Koefisien parsial dari variabel X
 ϵ_{it} = *Error term* di waktu t untuk unit *cross section* i
i = 1, 2, 3, ..., 35 (data *cross section* 35 Kab./Kota di Jawa Tengah)
t = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (data *time series* 2016–2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar. Luas Jawa Tengah 32.544,12 km² atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Secara administratif, Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 573 kecamatan. Pada tingkatan yang lebih rendah, terdapat 7.809 desa dan 750 kelurahan. Banyaknya jumlah kelurahan/desa menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 33.774.141 jiwa pada tahun 2015.

Tabel 1.1

Keadaan Ketimpangan Wilayah di Jawa Tengah dengan Indeks Williamson Tahun 2016-2020

Tahun	IW	Perubahan %
2016	0,65259949	
2017	0,819008015	0,254993342
2018	0,637919195	0,277488449
2019	0,631319566	0,010345556
2020	0,615937021	0,024365703

Pada Tabel 1.1, dapat dilihat selama tahun 2016-2020, indeks Williamson meningkat pada tahun 2017 kemudian turun terus hingga tahun 2020. Meningkatnya nilai indeks Williamson ini menggambarkan peningkatan ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah.

Pada Tahun 2016 Indeks Williamson termasuk kategori tinggi karena >0,5, kemudian pada tahun 2017 Indeks Williamson meningkat, pada tahun ini juga merupakan ketimpangan Jawa tengah tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018-2020 IW Provinsi Jawa Tengah turun dan stabil dikisar 0,6%.

Pemilihan Model Terbaik

Regresi data panel menyediakan empat kemungkinan model yang dapat digunakan yaitu *common effect*, *fixed effect* efek tetap), *fixed effect within-grup*, dan *random effect*. Untuk menentukan model yang lebih baik tergantung pada asumsi yang dibuat tentang korelasi yang mungkin terjadi antara individu, atau spesifik *cross-section*, komponen *error* (ϵ_i) dan variabel independen (X). Jika diasumsikan ϵ_i dan X tidak berkorelasi, *random effect* mungkin lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika komponen *error* individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias sehingga *fixed effect* mungkin yang tepat (Gujarati&Porter, 2013). Berdasarkan hasil regresi, model yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka atau *dummy* yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau disebut juga Covariance Model. Pada metode *fixed effect* estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi mengurangi heterogenitas antarunit *cross section*.

Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Penelitian mengenai analisis pengaruh aglomerasi industri, jumlah penduduk, terhadap tingkat disparitas pendapatan di Jawa Tengah dengan menggunakan analisis regresi data panel model *fixed effect*. Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y_{it} = 0.147806 - 0,445008 + 2.34E08 + \mu$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa model telah lulus uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji hipotesis menunjukkan R-square sebesar 0.894099. Artinya 89,40 persen Disparitas pendapatan dapat dijelaskan oleh variable aglomerasi dan jumlah penduduk. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Sementara itu, hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Aglomerasi industri dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan di Jawa Tengah.

Variabel Aglomerasi Industri (Agl) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan (Y) dengan pengaruh negatif. Besaran pengaruh dapat dilihat dari koefisien Agl yaitu - 0.445008. Artinya, setiap kenaikan aglomerasi industri 1 persen, akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan 0,44 persen. Walaupun pengaruhnya tidak signifikan namun nilai koefesiennya kecil dalam mengurangi tongkat ketimpangan pendapatan yaitu sebesar 0.445008, artinya terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tidak terlalu berdampak kepada penurunan angka ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Walaupun secara langsung variabel aglomerasi ekonomi ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun secara tidak langsung konsentrasi kegiatan ekonomi ini memberikan dampak terhadap naik

turunnya ketimpangan pendapatan antar daerah Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hubungan antara aglomerasi dengan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari besarnya rasio PDRB kabupaten/Kota terhadap PDRB total di Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi, hal ini disebabkan kondisi di setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Studi dari Samsir & Rahman (2018), Ha, Minh Nguyen, Le, Damng Nguyen & Kien Trung (2019) menyimpulkan bahwa variabel aglomerasi memiliki pola hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun penelitian ini berbeda dengan Yusica, Malik & Arifin (2018), Mukhlis, Hidayah & Sariyani (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel aglomerasi secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Variabel Jumlah Penduduk (Jml Pnd) berpengaruh signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan (Y) dengan pengaruh positif. Besaran pengaruh dapat dilihat dari koefisien Agl yaitu $2.34E-08$. Artinya, setiap kenaikan jumlah penduduk 1 persen, akan meningkatkan tingkat disparitas pendapatan 2.34 persen. Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian di mungkin pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (subsistence level). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut Stationary State. Dengan keadaan seperti ini akan membuat pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah akan melemah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji simultan (Uji - F) menunjukkan bahwa aglomerasi industri dan jumlah penduduk, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel aglomerasi industri mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat disparitas. Artinya, kenaikan aglomerasi industri akan menurunkan tingkat disparitas.
3. Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan dengan pengaruh positif terhadap tingkat disparitas pendapatan. Artinya, setiap kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat disparitas pendapatan.

Saran

1. Masing- masing pemerintah daerah agar lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi daerahnya masing-masing
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar lebih mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing

REFERENSI

- Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2014), h. 65
- Angelia, Y., & Hayati, B. 2010. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro
- Arif, M., & Wicaksana, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. **Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga**. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Baransano, Michael Albert.dkk. 2016. “*Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua*”. *Journal of Economics and Development Studies*. No.2, Vol.4
- Barika. 2012. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009”. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 04 (03): 1-11.
- Boediono. 2012. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Bonet, Jaime. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience*. *Ann Reg Sci* 40:661-676.
- Deddy T. Tikson. 2005. Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. <http://ecozon.html>. Diakses pada: Senin, 27 November 2021
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. Edisi pertama, Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Dwiputra, Reza Maulana (2018) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia (Periode 2011-2016)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Jhingan. M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Jawa Tengah dalam angka 2020
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Kuncoro, M. 2014. *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Kuznets, Simon. 1955. "Economic Growth and Income Inequality". *American Economic Review*
- Lessmann, C. 2006. *Fiscal Decentralization dan Regional Disparity: A panel Data Approach for OECD Countries*. *Journal Economic Research at the University of Munich*, 12(1): 12-31.
- Lestari, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di desa palopat maria kecamatan padangsidempuan hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2(2), 255–270.
- Rosa, Y. Del, & Sovita, I. (2016). Menara Ekonomi: ISSN : 2407-8565 Volume II No. 4 - Oktober 2016. *Menara Ekonomi*, 2(4), 41–52.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media. Cetakan Pertama. Padang.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono (2006), *Pembangunan Ekonomi: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Kencana*, Jakarta
- Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, (2004) melakukan penelitian tentang Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas periode tahun 1993-2003
- Tambunan.(2001) *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan. Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Thamrin, S. (2001). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Tarigan, Robinson.2005. *Ekonomi Regional teori dan Aplikasi Edisi Revisi* PT Bumi ANGkasara Jakarta
- Todaro. M.P. dan Smith. S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (Ahli Bahasa: Haris Munandar ; Puji A.L) Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael. P, 1993, *Perkembangan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),
- Wahyuntari, Linda Ika dan Pujiati, Amin. 2016. Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*. 5(3): 296-305.